

Judul : DPR Tagih Laporan Perkembangan IKN Tunjukkan Progres Nyata
Tanggal : Selasa, 04 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Tagih Laporan Perkembangan IKN Tunjukkan Progres Nyata

Senayan meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap kepada publik.

ANGGOTA Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan, Pemerintah secara jelas sudah mengatur pembangunan IKN terus berjalan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Isinya mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN.

Regulasi ini, terang dia, menegaskan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, tegas Khozin, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. "Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN," tandas politikus PKB ini.

Pasca terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, IKN disebut sebagai Ibu Kota Politik yang menjadikan pembangunannya makin jelas. Seharusnya, Perpres ini menjadi penyemangat bagi OIKN untuk meningkatkan kinerjanya.

"Artinya, target itu mesti

dikawal dengan optimal oleh OIKN dari berbagai aspek, termasuk urusan komunikasi publik," desak dia.

Selain itu, pemberitaan yang cenderung negatif dan pesimistis dari media asing akan berdampak pada citra buruk IKN dan Indonesia di mata internasional dan lokal. Hal ini terjadi apabila tidak dilakukan mitigasi dan upaya netralisasi oleh OIKN.

Karena bagaimanapun ekosistem pembangunan IKN kata Khozin, membutuhkan masuknya investor asing, sehingga *image* yang baik harus terus dijaga yang tentunya berbasis kondisi nyata di lapangan. "Di antara cara yang bisa ditempuh dengan perbaikan pola komunikasi publik," tandasnya.

Sebelumnya, surat kabar Inggris, *The Guardian* menyoroti progres pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Artikel yang dimuat pada Rabu (29/10/2025), berjudul *Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara Terancam Menjadi Kota Hantu*.

The Guardian menyoroti dana negara untuk proyek IKN telah menurun drastis, sementara pembangunan melambat dan sedikit pegawai negeri yang bersedia pindah dari Jakarta. Artikel ini juga menggambarkan, di sepanjang deretan bangunan baru yang futuristik, *boulevard-boulevard* Nusantara sebagian



Muhammad Khozin

besar kosong kecuali beberapa tukang kebun dan turis yang penasaran.

"Label yang disematkan itu perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi OIKN dalam meningkatkan kinerjanya, khususnya di bidang komunikasi publik," kata Khozin.

Bagaimana tanggapan OIKN? Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia, pembangunan fisik maupun non-fisik akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7 ribu pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

"Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20 ribu orang untuk mempercepat pembangunan IKN," ujar Basuki dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).

Basuki menjelaskan, saat ini pihaknya mulai tahap persiapan

pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Langkah ini menjadi bagian penting dalam pelengkap trias politika pada pembangunan IKN tahap kedua. Meliputi, pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

"Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025," kata Basuki.

Senada, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw membantah narasi mengenai kemunduran IKN. Ada kekeliruan narasi yang disampaikan oleh media asing tersebut. "Pembangunan IKN sudah terarah dan jelas sehingga tidak akan menjadi kota hantu," tegas Troy dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).

Untuk itu, Troy meminta kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dalam mempercayai pemberitaan. Sebab prospek pembangunan IKN sangat cerah dan tidak ada keraguan sama sekali. "Jangan mudah percaya media asing," pinta dia.

Dia memastikan perkembangan IKN dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak kalah melejit dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga isu pekerjaan konstruksi IKN melambat tidak benar sama sekali.

Dia menambahkan, Pemerintah telah menunjukkan dukungannya dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Tidak hanya satu kebijakan, lanjut dia, Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Isinya mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam regulasi tersebut Nusantara ditetapkan akan menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Regulasi tersebut telah ditetapkan pada 30 Juni 2025.

Troy memastikan, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, tapi juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.

Sebagai informasi, APBN untuk IKN periode 2025-2029 telah diketok sebesar Rp 48,8 triliun. Sedangkan, komitmen investasi sebanyak Rp 225,02 triliun. Rinciannya, Rp 66,3 triliun dari investasi swasta murni dan Rp 158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan, *multi-utility tunnel*, dan pembangunan hunian di kawasan IKN. ■ TIF